

**FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DALAM MENINGKATKAN
TRANSPARANSI PADA DINAS SOSIAL ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

CUT NOVIDAR
NIM. 210802052

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cut Novidar
Nim : 210802052
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 07 Mei 2003
Alamat : Ie Masen Ulee Kareng, Kecamatan Ulee Kareng
: Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 April 2025

Yang menyatakan,



Cut Novidar
NIM. 210802052

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DALAM MENINGKATKAN
TRANSPARANSI PADA DINAS SOSIAL ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

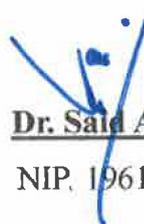
CUT NOVIDAR

NIM. 210802052

Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
A R - R A N I R Y

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Saif Amirul Kamar, M.M., M.Si

NIP. 196110051982031007

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PADA DINAS
SOSIAL ACEH**

SKRIPSI

CUT NOVIDAR
NIM. 210802052

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 25 April 2025
25 Syawal 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Said Amirul Kamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007


Shafiyur Rahman, S.A.P.
NIP. -

Penguji I,

A R - R A N I Penguji II,


Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D.
NIP. 198307272011011011


Khalida Ulfa, M.I.P.
NIP. -

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fungsi PPID untuk meningkatkan transparansi pada Dinas Sosial Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam meningkatkan transparansi, serta mengetahui dan menganalisis menjaga keamanan informasi pada Dinas Sosial Aceh melalui dimensi mandiri, sengketa informasi dengan indikator kualitas, dana, mediasi dan pejabat publik, serta dimensi produk informasi dan pengelolaan informasi dengan indikator dikirim, disimpan, kepentingan publik dan kepentingan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID Dinas Sosial Aceh telah menunjukkan upaya implementasi transparansi informasi yang baik meski menghadapi kendala pengurangan anggaran sejak 2022, website PPID Dinas Sosial Aceh telah berhasil menyajikan informasi secara terbuka dan terstruktur secara online, mencerminkan upaya pemenuhan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan digital yang signifikan yang menghambat tercapainya tujuan keterbukaan informasi publik secara menyeluruh. Terbatasnya sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi website PPID kepada masyarakat sejak 2021 mengakibatkan kelompok lansia dan masyarakat yang kurang melek teknologi mengalami kesulitan dalam mengakses layanan informasi digital.

Kata Kunci: *PPID, Transparansi, Dinas Sosial Aceh*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Fungsi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Transparansi Pada Dinas Sosial Aceh.”** Selanjutnya Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-I) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam Penulisan Skripsi ini peneliti telah banyak mendapat Bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Bapak Dr. Muji Mulia M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Ibu Muazzinah, MPA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si. Selaku Pembimbing I yang telah membimbing memberikan arahan dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D Selaku Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk menguji peneliti sehingga terlaksananya Sidang Munaqasyah Skripsi;
7. Ibu Khalida Ulfa, M.I.P. Selaku Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji peneliti sehingga terlaksananya Sidang Munaqasyah Skripsi;
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan;
9. Terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yang sangat saya sayangi yaitu Ayahanda Teuku Jufri dan Ibuanda Ruwaida selaku

orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

10. Terimakasih kepada my best partner Makhisan Nawar, terimakasih telah menjadi bagian awal dari perjalanan kuliah hingga sekarang, serta Dian Fitria, Cut Irma Fianda, Cut Amira Cantika sebagai sahabat peneliti yang senantiasa menemani, mendukung peneliti dalam kesedihan, dan mendorong peneliti untuk tidak menyerah;

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baiknya balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 17 April 2025
Peneliti,

Cut Novidar
NIM. 210802052



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Teori Transparansi	14
2.2.2 Konsep Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)	15
2.2.3 Konsep Fungsi	17
2.3 Kerangka Berpikir	20
BAB III	21
METODE PENELITIAN	21
3.1 Pendekatan Penelitian	21
3.2 Fokus Penelitian	22
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	22
3.4 Jenis dan Sumber Data	22
3.5 Informan Penelitian	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data	23

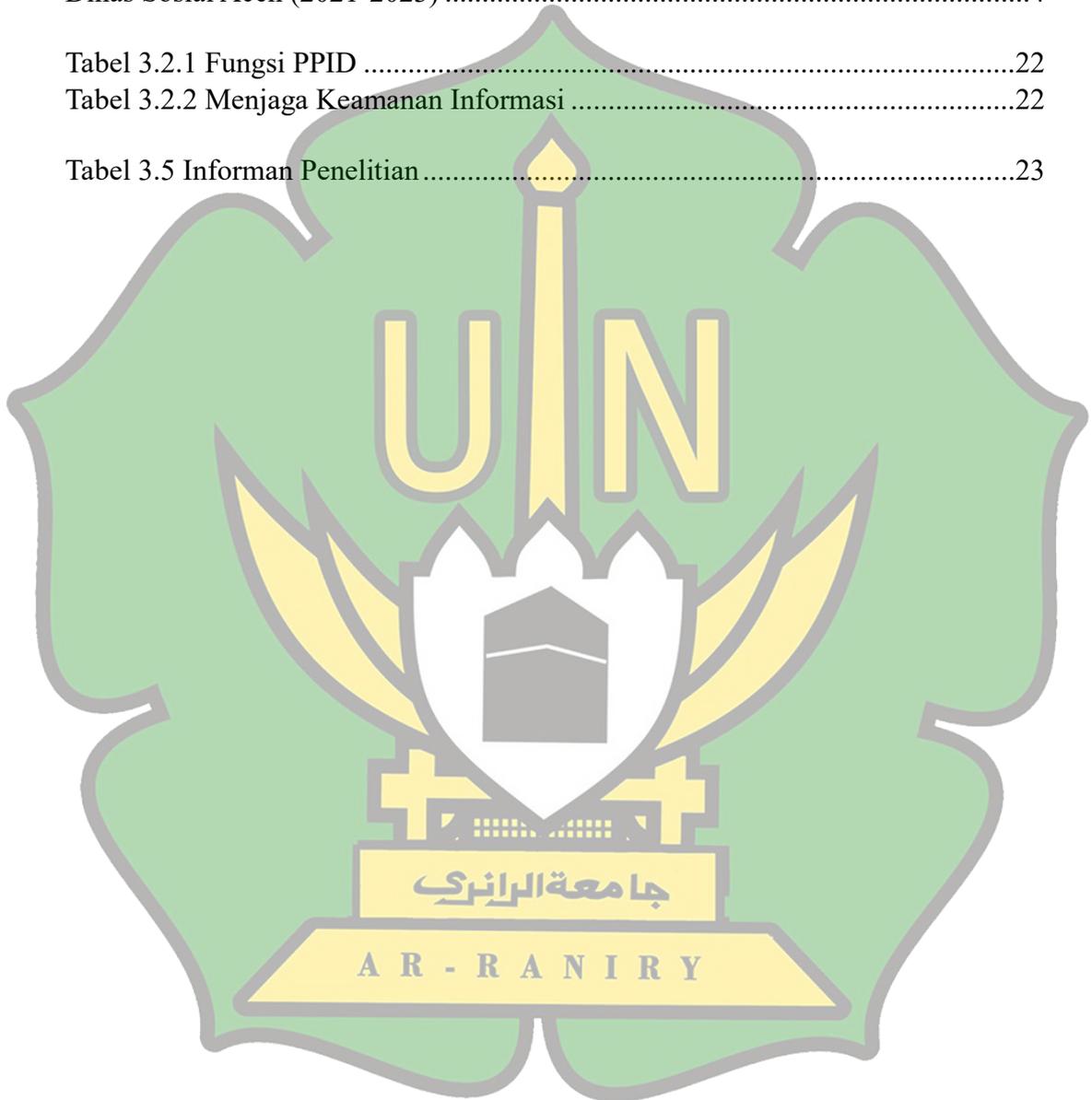
3.7 Teknik Keabsahan Data	24
3.8 Teknik Analisis Data	25
BAB IV	27
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
4.1.1 Profil PPID Dinas Sosial Aceh	28
4.1.2 Visi dan Misi PPID Dinas Sosial Aceh	28
4.1.3 Tugas dan Fungsi PPID Dinas Sosial Aceh	29
4.1.4 Struktur Organisasi PPID Dinas Sosial Aceh	29
4.2 Hasil Penelitian	30
4.2.1 Fungsi PPID dalam meningkatkan transparansi pada Dinas Sosial Aceh	30
4.2.2 Keamanan terhadap informasi dalam meningkatkan transparansi pada Dinas Sosial Aceh.....	48
4.3 Pembahasan Penelitian	59
4.3.1 Fungsi PPID dalam meningkatkan transparansi pada Dinas Sosial Aceh	59
4.3.2 Menjaga Keamanan Informasi pada Dinas Sosial Aceh	62
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR LAMPIRAN	72

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR TABEL

Grafik 1.1 Tingkat Kesesuaian Produk Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan di Dinas Sosial Aceh (2021-2023)	4
Tabel 3.2.1 Fungsi PPID	22
Tabel 3.2.2 Menjaga Keamanan Informasi	22
Tabel 3.5 Informan Penelitian	23



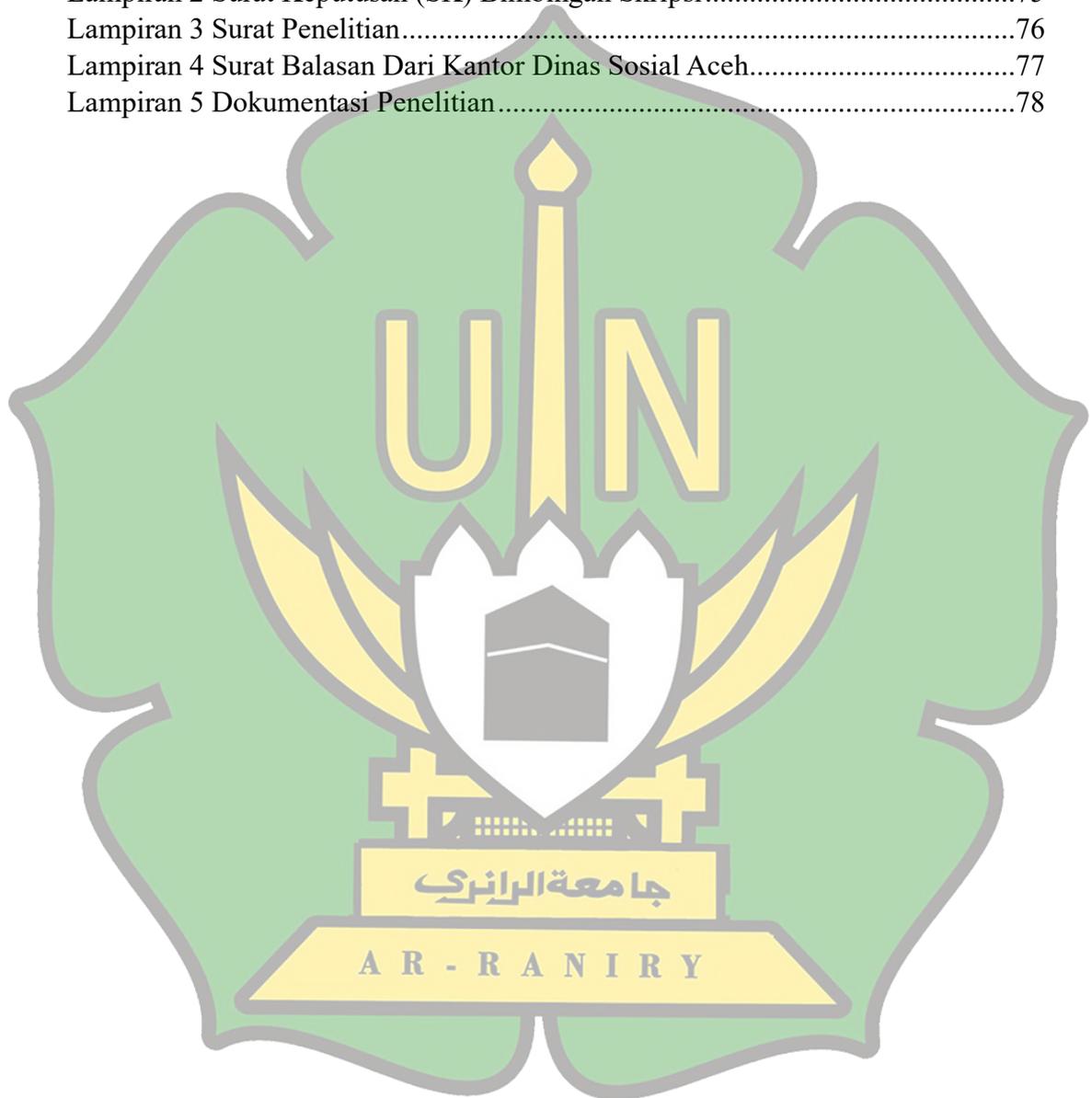
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Dinas Sosial Aceh.....	27
Gambar 4. 2 Stuktur PPID Dinas Sosial Aceh.....	29
Gambar 4. 3 Informasi Publik SKPA PPID Dinas Sosial Aceh.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	72
Lampiran 2 Surat Keputusan (SK) Bimbingan Skripsi.....	75
Lampiran 3 Surat Penelitian.....	76
Lampiran 4 Surat Balasan Dari Kantor Dinas Sosial Aceh.....	77
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era keterbukaan informasi akses terhadap informasi telah menjadi semakin luas dan mudah bagi setiap orang. Kemudahan mendapatkan informasi ini telah membuka pintu lebar bagi masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan dengan cara yang lebih cepat dan efisien termasuk informasi yang bersifat publik. Sejalan dengan prinsip transparansi yang menjadi ciri khas negara-negara demokratis. Keterbukaan informasi publik tidak hanya mencerminkan pengakuan atas hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.¹

Pemerintahan elektronik atau yang dikenal dengan istilah *e-government*, merupakan implementasi teknologi internet dalam sistem administrasi pemerintahan modern. Konsep ini dikembangkan sebagai solusi strategis untuk memungkinkan pemerintah memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Dalam melaksanakan pelayanan informasi, maka pemerintah membentuk unit khusus yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Unit ini memiliki tugas utama mengelola seluruh siklus informasi publik, mulai dari proses penyimpanan data, pendokumentasian arsip, hingga penyediaan akses informasi yang mudah dan cepat bagi masyarakat, sehingga menjamin keterbukaan informasi

¹ Ni Made Lestari, dkk, "Efektivitas Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Di KPU Kabupaten Karangasem," *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)* 3, no. 2 (2023): hal.77.

dan akuntabilitas pelayanan publik.² Di mana website merupakan sarana strategis dalam mewujudkan *e-government*, yaitu pendekatan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Melalui platform digital, pemerintah dapat menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan interaktif, sehingga memudahkan komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat dan akuntabel.³

Salah satu Badan Publik di Provinsi Aceh yaitu Dinas Sosial Aceh, PPID Pembantu Dinas Sosial Aceh merupakan ujung tombak yang bertanggung jawab mengelola dan menyediakan layanan informasi publik secara transparan di lingkungan Dinas Sosial Aceh. Pada 2021, Dinas Sosial Aceh mengadakan pelatihan bagi petugas desk layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman dalam melayani permohonan informasi publik. Kegiatan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi, baik secara langsung maupun daring kepada masyarakat.⁴ Keberadaan PPID memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses pengajuan permintaan informasi, karena seluruh layanan dilakukan melalui satu pintu. Pemohon informasi tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan, karena layanan ini dapat diakses secara online. Pengaduan atau laporan yang diterima akan terlebih dahulu disampaikan kepada PPID utama yang berada di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh. PPID utama

² Dinas Sosial Aceh, "Profil PPID Pembantu Dinas Sosial Aceh," *Dinsos.Aceh Prov*, 2021, <https://dinsos.acehprov.go.id/halaman/profil-ppid-pembantu-dinas-sosial-aceh>.

³ Nesthy Kheren Nadia, dkk, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website Ppid Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko)," *Jurnal Komunikatio* 8, no. 1 (2022): hal.30.

⁴ Dinas Sosial Aceh, "Tim PPID Utama Bekali Petugas Desk Layanan Dinas Sosial Aceh," *Dinsos. Aceh Prov*, 2021, <https://dinsos.acehprov.go.id/berita/kategori/dinsos-aceh/tim-ppid-utama-bekali-petugas-desk-layanan-dinas-sosial-aceh>.

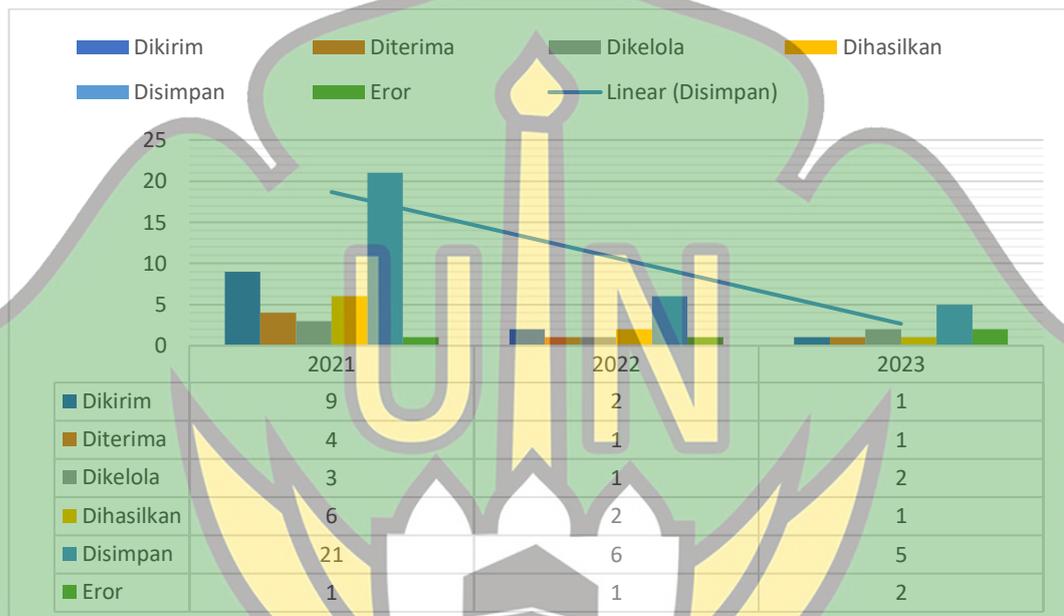
kemudian akan meneruskan serta mengoordinasikan tindak lanjut pengaduan tersebut dengan PPID pembantu yang ada di Dinas Sosial Aceh, memastikan penanganan yang terintegrasi dan tepat sasaran.

Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu masalah utama terbatasnya informasi dalam mengetahui bagaimana fungsi PPID sehingga menyebabkan ketidakefisienan dan kurangnya struktur dalam proses pelaporan, yang dapat mengakibatkan keterlambatan atau ketidaklengkapan data. Masalah lainnya yang perlu diperhatikan adalah kerentanan sistem terhadap gangguan eksternal menimbulkan kekhawatiran serius, terutama terkait potensi pelanggaran keamanan data. Meskipun PPID telah membawa kemajuan besar dalam pelayanan informasi publik, perbaikan dalam aspek efisiensi pelaporan dan keamanan sistem masih diperlukan untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal pada PPID Dinas Sosial Aceh, teridentifikasi adanya penghentian dukungan anggaran untuk fungsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik selama periode 2023-2024. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya kebijakan Penjabat (PJ) Gubernur yang meniadakan pembiayaan honorer di luar tenaga kontrak, pengalihan prioritas anggaran untuk mendukung agenda nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serta keterbatasan anggaran pemerintah secara keseluruhan. Hal ini berdampak langsung pada upaya optimalisasi pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID. Dampak nyata dari kebijakan penghentian dukungan anggaran tersebut dapat dilihat dengan jelas

dari laporan tingkat kesesuaian layanan dengan standar yang telah ditetapkan di Dinas Sosial Aceh dari tahun 2021 sampai 2023 sebagai berikut:

Grafik 1.1 Tingkat Kesesuaian Produk Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan di Dinas Sosial Aceh (2021-2023)



Sumber: Olahan Peneliti 2024

Pada tahun 2021, Dinas Sosial Aceh mengelola berbagai dokumen dan informasi penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan sosial. Dari total 21 dokumen yang tercatat, sebanyak 9 dokumen telah dikirimkan, meliputi perjanjian kinerja pejabat secara berjenjang, laporan kinerja tahunan, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, hingga pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Selain itu, Dinas Sosial Aceh juga menerima 4 dokumen penting yang berisi pedoman dan panduan pelayanan sosial. Dokumen-dokumen ini mencakup kriteria pendataan fakir miskin, asistensi sosial untuk lanjut usia, pedoman layanan pengangkatan anak, serta panduan pendataan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dalam hal pengelolaan internal, terdapat 3 dokumen utama yang dikelola, yaitu rancangan awal rencana kerja, rekapitulasi daftar barang milik Aceh, dan pedoman pengelolaan pengaduan terkait bantuan sosial pangan. Lebih lanjut, Dinas Sosial Aceh juga menghasilkan 5 dokumen strategis, yang mencakup struktur organisasi, Surat Keputusan (SK) PPID, perubahan rencana strategis 2017-2022, daftar informasi dan dokumentasi publik, serta rekapitulasi program/kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2021. Dari keseluruhan 21 dokumen yang tercatat, terdapat 1 dokumen yang mengalami kendala/error dalam proses pengelolaannya. Namun demikian, pengelolaan dokumen lainnya berjalan lancar dan mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial Aceh dalam menyediakan pelayanan sosial yang transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2022, Dinas Sosial Aceh mencatat aktivitas pengelolaan dokumen yang lebih terfokus dengan total 6 dokumen yang disimpan. Dari jumlah tersebut, 2 dokumen telah dikirimkan, keduanya berupa Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosial Aceh dan PPID tahun 2021. Selain itu, Dinas ini menerima 1 dokumen penting berupa dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah untuk tahun anggaran 2022. Dalam aspek pengelolaan internal, terdapat 1 dokumen utama yang dikelola, yaitu rencana akhir rencana kerja Dinas Sosial Aceh tahun 2022. Sementara itu, Dinas Sosial Aceh juga menghasilkan 2 dokumen strategis, yakni SK PPID dan struktur organisasi Dinas Sosial Aceh tahun 2022. Dari total 6 dokumen yang tercatat, terdapat 1 dokumen yang mengalami kendala/error dalam

pengelolaannya, meskipun pengelolaan dokumen lainnya tetap berjalan lancar untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas Sosial Aceh secara optimal.

Pada tahun 2023, Dinas Sosial Aceh mengelola total 5 dokumen dengan berbagai aktivitas pengelolaan. Dinas ini mengirimkan 1 dokumen, yaitu rencana akhir rencana kerja Dinas Sosial Aceh tahun 2022, serta menerima 1 dokumen penting berupa persetujuan rekapitulasi dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) untuk tahun anggaran 2023. Dalam pengelolaan internal, terdapat 2 dokumen utama yang dikelola, yaitu rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun 2023 serta rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh tahun 2023. Selain itu, Dinas ini menghasilkan 1 dokumen strategis berupa laporan survei kepuasan masyarakat tahun 2023. Dari total 5 dokumen yang dikelola, tercatat 2 dokumen mengalami kendala/error dalam proses pengelolaannya. Meskipun demikian, dokumen lainnya berhasil dikelola untuk mendukung efektivitas dan transparansi pelayanan Dinas Sosial Aceh.

Dalam pemerintahan modern, dua elemen utama yang berperan dalam memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat adalah pelayanan publik dan pelayanan informasi publik. Kedua aspek ini menjadi landasan utama dalam membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel. Secara khusus, pelayanan informasi publik memiliki peran krusial dalam memastikan ketersediaan akses informasi yang berkualitas bagi setiap warga negara. Dengan akses informasi yang

memadai, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih tepat serta berpartisipasi aktif dalam berbagai proses pemerintahan.⁵

Di era globalisasi dan digitalisasi telah menghadirkan tuntutan baru dalam pengelolaan informasi publik, khususnya bagi lembaga pemerintahan seperti Provinsi Aceh. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan seluruh institusi publik untuk mengedepankan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, sehingga akses terhadap informasi bukan sekadar pelengkap, melainkan telah menjadi kebutuhan esensial bagi setiap individu dalam mengembangkan wawasan, memahami dinamika sosial, dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat berbasis informasi.⁶ Transformasi ini menandai pergeseran paradigma dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, di mana transparansi informasi menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewajiban Badan Publik, setiap Badan Publik wajib:

1. Mengelola Informasi Publik
2. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik selain informasi yang dikecualikan dengan pelayanan yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi

⁵ Prita Rara Ulumiyah and Rindri Andewi Gati, "Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Portal Website PPID Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi," *Pembangunan Dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2024).

⁶ Nesthy Kheren Nadia, dkk, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website Ppid Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko)."

4. Mengumumkan layanan informasi, paling sedikit sekali dalam setahun, yang meliputi: Pemohon informasi, jumlah permintaan informasi, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/ atau alasan penolakan permintaan informasi.⁷

Pemerintah harus senantiasa meningkatkan transparansi, keterlibatan masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan publik, khususnya dalam aspek informasi dan dokumentasi, agar hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi dengan baik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam penyampaian informasi.⁸

Keterbukaan informasi publik menjadi esensial untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam konteks ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memegang peranan yang sangat penting dalam mengelola dan menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Peran PPID tidak hanya mendukung keterbukaan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai "Fungsi PPID dalam Meningkatkan Transparansi di Dinas Sosial Aceh", guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kontribusi PPID

⁷ "Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik," n.d.

⁸ Warnadi and Muhklas Adi Putra, "Analisis Kualitas Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu," *Jurnal Bisnis Kompetitif* 1, no. 3 (2022): 253–58, <https://doi.org/10.35446/bisniskompetif.v1i3.1185>.

dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang efektif dan berdampak positif pada pemerintahan yang akuntabel.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Terbatasnya informasi dalam mengetahui bagaimana fungsi PPID untuk meningkatkan transparansi pada Dinas Sosial Aceh
2. Belum optimalnya keamanan informasi pada Dinas Sosial Aceh

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam meningkatkan transparansi pada Dinas Sosial Aceh?
2. Bagaimana menjaga keamanan informasi pada Dinas Sosial Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam meningkatkan transparansi pada Dinas Sosial Aceh
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjaga keamanan informasi pada Dinas Sosial Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan tentang fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam meningkatkan transparansi pada Dinas Sosial Aceh. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademis tentang implementasi keterbukaan informasi publik dan menjadi referensi berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Aceh, serta membantu akademisi dalam menemukan solusi dalam sebuah pemecahan permasalahan terkait dengan fungsi PPID dalam meningkatkan transparansi pada Dinas Sosial Aceh.

